



Prinsip-Prinsip *Good Governance* dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Tambaksari Kidul, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas

Khofifah Nurul Hidayah¹, Chamid Sutikno², Indah Ayu Permana Pribadi³, Ariesta Amanda⁴, Zaula Rizqi Atika⁴

¹⁻⁵Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ekonomi Sosial, Ekonomi, dan Humaniora, Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto

Alamat: Karangklesem, Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah

Korespondensi penulis: nurulhidayahkhofifah@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze the implementation of Good Governance principles, including accountability, transparency, and participation in the management of Village Funds in Tambaksari Kidul Village, Kembaran Subdistrict, Banyumas Regency. The research method uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques through interviews, observations, and documentation. The results of the study indicate that accountability in village financial reporting has been carried out in accordance with regulations, although there are still delays in reporting. Transparency in budgeting and the implementation of village funds has been conducted through village meetings and village information media, but has not yet reached the stage of impact evaluation. Community participation is quite active in planning and implementation, but minimal in the evaluation stage. Challenges faced include limited human resources, infrastructure, and low community participation. Strengthening human resource capacity, improving information transparency, and optimizing inclusive village meetings are needed to support better village fund management.*

Keywords: *Village Funds, Good Governance, Accountability, Transparency, Participation.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* yang meliputi akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Tambaksari Kidul, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas dalam pelaporan keuangan desa telah berjalan sesuai ketentuan, meskipun masih terdapat keterlambatan pelaporan. Transparansi anggaran dan realisasi dana desa sudah dilakukan melalui musyawarah desa dan media informasi desa, tetapi belum sampai pada evaluasi dampak. Partisipasi masyarakat cukup aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan, namun minim dalam tahap evaluasi. Kendala yang dihadapi antara lain keterbatasan SDM, sarana prasarana, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Diperlukan penguatan kapasitas SDM, peningkatan keterbukaan informasi, dan optimalisasi musyawarah desa secara inklusif untuk mendukung tata kelola dana desa yang lebih baik.

Kata kunci: Dana Desa, Good Governance, Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi.

1. LATAR BELAKANG

Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan lebih besar kepada desa dalam mengelola potensi serta anggaran yang dimiliki, termasuk Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tujuan alokasi Dana Desa tersebut adalah untuk mempercepat pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, 2016). Namun demikian, dalam pelaksanaannya, pengelolaan Dana Desa di berbagai daerah masih menghadapi sejumlah persoalan seperti lemahnya akuntabilitas, kurang transparannya penggunaan anggaran, serta rendahnya partisipasi

masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan (Astuti & Yulianto, 2016). Hal tersebut berpotensi menghambat terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang baik. Desa Tambaksari Kidul, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas merupakan salah satu desa penerima Dana Desa yang mengalami peningkatan anggaran setiap tahun. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis sejauh mana penerapan prinsip-prinsip good governance, khususnya akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dalam pengelolaan Dana Desa di wilayah tersebut.

2. KAJIAN TEORITIS

Good Governance

Good Governance merupakan tata kelola pemerintahan yang menekankan akuntabilitas, transparansi, partisipasi, supremasi hukum, serta efektivitas dan efisiensi dalam proses kebijakan public (Syakrani, 2009).

Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan segala keputusan dan tindakan kepada pihak berwenang serta masyarakat (Sedarmayanti, 2013).

Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan informasi yang menjamin masyarakat memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik (Sedarmayanti, 2013).

Partisipasi

Partisipasi merupakan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan publik (Sedarmayanti, 2013).

Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang ditransfer ke desa melalui pemerintah kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (Triani & Handayani, 2018).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan fenomena implementasi *Good Governance* di tingkat desa. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan Kepala Desa, perangkat desa, anggota BPD, serta masyarakat penerima manfaat Dana Desa. Selain itu, dilakukan observasi langsung terhadap kegiatan musyawarah desa, pelaporan keuangan, serta dokumentasi terkait APBDes dan laporan pertanggungjawaban. Teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, & Saldana (2014) yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara simultan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Akuntabilitas

Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Tambaksari Kidul telah dijalankan melalui pelaporan keuangan menggunakan aplikasi OM-SPAN dan Siskeudes. Pelaporan ini dilakukan kepada pemerintah kabupaten dan pemerintah pusat secara periodik sesuai ketentuan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pemerintah Desa juga membuat Peraturan Desa (Perdes) tentang APBDes di setiap akhir tahun sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Namun demikian, pelaksanaan akuntabilitas masih berfokus pada pelaporan administratif tanpa evaluasi substansi kegiatan. Proses pengawasan internal juga belum berjalan optimal karena belum terdapat mekanisme sanksi atas pelanggaran akuntabilitas (Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, 2016).

Transparansi

Pemerintah Desa Tambaksari Kidul telah melakukan transparansi keuangan melalui baliho APBDes yang dipasang di balai desa dan musyawarah desa. Selain itu, laporan realisasi Dana Desa diumumkan secara terbuka dalam musyawarah desa. Namun, publikasi informasi melalui website desa masih minim karena media sosial yang dimiliki tidak diperbarui secara rutin (Armaningsih & Handayani, 2019). Prinsip transparansi menurut Sedarmayanti (2012) adalah memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk memperoleh informasi pelayanan publik yang ada. Dalam penelitian ini, informasi yang disediakan pemerintah desa baru sebatas anggaran dan realisasi, belum mencakup evaluasi dampak kegiatan.

Partisipasi

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Tambaksari Kidul cukup aktif pada tahap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan melalui forum Musyawarah Desa (Musdes) dan Musrenbangdes. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 yang mewajibkan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. Namun, partisipasi masyarakat dalam tahap evaluasi masih rendah. Faktor penyebabnya adalah minimnya sosialisasi pemerintah desa dan rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi dalam evaluasi pembangunan (Fhatimatuz Zehroil Batul, 2018).

Faktor Penghambat dan Pendorong

Beberapa faktor penghambat penerapan *Good Governance* di Desa Tambaksari Kidul meliputi keterbatasan SDM, sarana informasi desa yang minim, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi. Selain itu, kurangnya disiplin pegawai desa dan dominasi pegawai usia lanjut menjadi tantangan tersendiri dalam penerapan pelayanan publik yang responsif (Astuti & Yulianto, 2016). Adapun faktor pendorongnya adalah antusiasme masyarakat terhadap pembangunan desa serta komitmen pemerintah desa dalam menyelenggarakan musyawarah desa secara terbuka. Partisipasi aktif masyarakat, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan, memberikan kontribusi positif terhadap kelancaran program Dana Desa.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penerapan prinsip *Good Governance* di Desa Tambaksari Kidul telah berjalan cukup baik, khususnya dalam akuntabilitas pelaporan keuangan dan partisipasi masyarakat di tahap perencanaan. Namun, masih terdapat kelemahan pada aspek pengawasan, evaluasi, dan keterbukaan informasi dampak kegiatan. Untuk meningkatkan kualitas tata kelola Dana Desa, diperlukan upaya peningkatan kapasitas SDM desa, optimalisasi media informasi desa, serta penguatan forum musyawarah desa yang lebih inklusif dan partisipatif.

DAFTAR REFERENSI

- Armaningsih, D. I., & Handayani, N. (2019). Akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 8(2).
- Astuti, T. P., & Yulianto. (2016). Good governance pengelolaan keuangan desa. *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 1(1), 1–14.
- Astuti, T. P., & Yulianto. (2016). Good governance pengelolaan keuangan desa menyongsong berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 1(1), 1–14.
- Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa. (2016, Desember 7). Kebijakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. <https://www.djpk.kemenkeu.go.id>
- Fhatimatuz Zehroil Batul. (2018). Implementasi pengelolaan dana desa. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 5(1).
- Nugroho, R. (2014). Public policy: Dinamika kebijakan, analisis kebijakan, manajemen kebijakan. Elex Media Komputindo.
- Putra, A. G., & Lestari, D. (2020). Evaluasi pengelolaan keuangan desa dalam perspektif akuntabilitas publik. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 15(2), 101–115.
- Riyadi, S. (2015). Akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam mendukung pembangunan desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(1), 45–53.
- Sedarmayanti. (2012). Good governance (kepemerintahan yang baik). Mandar Maju.
- Sulistiyani, A. T. (2016). Kemitraan dan model-model pemberdayaan. Gava Media.